

BATAS NEOLIBERAL: PERLUASAN KAPITALIS DAN PEREKONOMIAN INFORMAL DI INDONESIA

*Dylan Clark.*¹

Pagi hari, buruh-buruh pabrik di Cimahi menyesaki jalanan. Mereka berkerumun di bangku-bangku reyot, berbincang satu sama lain, sambil menikmati sarapan. Seorang wanita menawar sepasang sepatu plastik, dari pedagang yang menggelar barang dagangannya di atas selembur kain. Wanita lainnya mengirim pesan singkat alias sms kepada pengasuh anak, untuk menanyakan kabar anaknya. Kepulan asap rokok yang dihembuskan mulut ratusan orang, menyatu dengan asap knalpot kendaraan. Angkot dan ojek berhenti di pinggir jalan, menurunkan banyak penumpang, yang juga buruh pabrik.

Pabrik terdekat –suatu perusahaan garmen ekspor– dikelilingi

tenda-tenda pedagang kaki lima (PKL), yang kelangsungan hidupnya tergantung dari pendapatan para buruh pabrik. Ketergantungan mereka kepada para buruh pabrik sangat tinggi, karena pada dasarnya hidup keluarga para PKL itu tergantung pada upah yang diterima buruh pabrik. Mereka, ibarat berangas yang menjadi parasit di tubuh ikan paus. Atau malah sebaliknya?

Dapatkah pabrik itu bertahan hidup tanpa lautan para pekerja “informal” ini? Dapatkah pabrik itu bertahan hidup tanpa subsidi dari bidang reproduktif (Wolf 1992)? Dapatkah pabrik-pabrik itu menawarkan gaji yang hanya Rp 934.250,00 setiap bulannya (US\$ 78)², tanpa kehadiran 71 persen

¹) Asisten Profesor di Jurusan Antropologi, Universitas Toronto. Saya ingin berterima kasih dengan sepenuh hati dan sedalam-dalamnya pada Resmi Setia Milawati, karena tanpanya tulisan ini tidak akan pernah terjadi.

²) Suwarni 2008.

tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor ekonomi non-formal? Dapatkah pabrik-pabrik itu bertahan hidup tanpa adanya pengaturan tenaga kerja yang fleksibel, subkontrak, dan *outsourcing*? Saya ingin memperdebatkan bahwa kapital global, melalui pabrik-pabrik seperti yang terdapat di Cimahi, sedang memperluas saluran ekstraksinya melalui cara-cara baru.

Dengan memperhatikan pola-pola itu, kita akan dipaksa untuk memikirkan kembali cerita tentang pembangunan Indonesia. Sejak 1945, perekonomian Indonesia secara normatif terlihat mengikuti alur yang jelas. Jalan hidup yang dipilih oleh Indonesia, sama seperti negara-negara post kolonial lainnya, dimulai dari dekolonisasi dan sosialisme pada zaman Sukarno, sampai dengan kebangkitan Orde Baru dan keakrabannya dengan hegemoni Amerika. Seperti banyak negara post kolonial, Indonesia akhirnya memilih jalan untuk bergabung dengan cita-cita kapitalisme global, dan Indonesia diberi peran sebagai “negara berkembang”.

Sebagai negara miskin, Indonesia harus mengeksploitasi sumber-sumber daya alam yang dimilikinya

untuk tujuan ekspor, mengubah sebagian besar lahan pertanian menjadi lahan industri, dan menjadi tempat bagi usaha manufaktur yang dikendalikan oleh negara-negara asing (Hill 1996). Sebagai gantinya, negara, institusi-institusi keuangan internasional, dan para ahli teori pembangunan, menjanjikan sebuah jalan menuju “pertumbuhan ekonomi” yang diukur oleh indikator-indikator ekonomi standar seperti “produk domestik bruto”.³

Setelah mengalami kemiskinan, Indonesia harus memperoleh kekayaan melalui “perdagangan bebas” dalam ruang global kapitalisme transnasional. Tidakkah Indonesia mengikuti pola yang telah disediakan? Tidakkah Indonesia menyaksikan pertumbuhan ekonomi, kebangkitan kelas menengah, dan bahkan kehadiran demokrasi? Apakah Indonesia memang sesungguhnya sedang *berkembang*?

Dalam tulisan ini, saya berargumen bahwa Indonesia mewakili sebuah bangsa yang berpegang pada sebuah pembangunan ekonomi bentuk baru; sebuah terobosan yang senantiasa memperdalam perekonomian “informal”. Saya ingin menyatakan bahwa kapitalisme saat ini sedang

³⁾ Untuk ikhtisar dan pembahasan asumsi-asumsi yang lengkap, lihat Peet 2007, 46-50 dan MacEwan 1999.

mengalami sebuah transformasi perimbangan yang luar biasa, dan Indonesia merupakan sebuah tempat yang cocok dalam merenungkan perbaikan-perbaikan tersebut. Saya ingin menyatakan bahwa perekonomian Indonesia telah memasuki peranan barunya dalam kapitalisme global. Sebuah peranan yang akan membuat sebagian besar masyarakatnya miskin untuk beberapa masa mendatang.

Secara khusus, saya ingin membahas sektor informal di Indonesia yang jumlahnya berlimpah, dan menyatakan bahwa perluasan sektor informal di Indonesia terjadi di tengah-tengah krisis. Klaim ini berdasarkan pada hasil penelitian lapangan saya bersama dengan Resmi Setia Milawati di Bandung pada tahun 2008, dan juga wawancara saya dengan para pemilik perusahaan penting di tingkat lokal. Untuk menekankan pentingnya sektor informal global, saya mengikuti karya Lourdes Benaría, Alejandro Portes, dan Manuel Castells (cf. Portes, Castell, & Benton 1989). Saya juga menggunakan data terkini yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, di mana data itu menunjukkan pertumbuhan stabil sektor informal dalam waktu sepuluh tahun terakhir (1998-2008), dan mungkin jauh lebih lama dari sepuluh tahun

(Frankema dan Marks 2007).

Banyak penelitian yang menunjukkan perluasan di sektor informal secara global, dari 1980 sampai dengan 1999 (bandingkan dengan tulisan Jacques Charmes dikutip dalam Lourdes 2003: 111). Sebuah penelitian dari International Labour Organization/ILO (2007) juga menyatakan hal yang sama. Penelitian tersebut berupaya memprediksi sektor informal sampai dengan tahun 2015, dan melihat bahwa di masa depan tidak akan ada kemunduran dalam sektor informal, serta menggambarkan banyaknya kendala dalam upaya formalisasi tenaga kerja. Meskipun demikian, saya ingin menyatakan bahwa perekonomian informal di Indonesia yang melonjak cepat, harus dipahami, khususnya sebagai bagian dari efek fenomena global: perluasan baru dari kapitalisme.

Melacak Pembangunan di Indonesia

Sejak masa kemerdekaan, politik dan ekonomi Indonesia telah mengikuti sebuah alur yang mudah ditebak: dengan adanya dekolonisasi, negara mengganti sistem pemerintahan dan kepemilikan kolonial dengan sistem pribumi. Dan, dihadapkan pada kebutuhan untuk

“modernisasi”, juga kebutuhan untuk nilai mata uang yang kuat, pemerintahan baru di Indonesia mencari bantuan dan investasi luar negeri. Pertama dari blok komunis, lalu dari pusat-pusat kapitalisme. Blok kapitalis yang dipimpin oleh pemerintah Amerika, kemudian mengeksploitasi kelemahan-kelemahan politik dan ekonomi yang dialami pemerintahan awal Indonesia, dan membantu kemunculan Orde Baru; sebuah rezim otoritarian yang berkomitmen pada penanaman modal luar negeri, penyesuaian struktural, dan militerisasi. Rezim ini menghasilkan peningkatan yang menakjubkan dalam hal usaha manufaktur. Alhasil, Indonesia menjadi daerah tujuan para penanam modal asing.

Sejak 1970-an sampai saat ini, Indonesia telah menjadi bagian dari perubahan besar dalam kualitas kapitalisme, seiring dengan perpindahan besar-besaran usaha manufaktur ke negara-negara miskin. Menurut Jeffrey Winters (1996: 218): “Dalam penutupan dekade di abad dua puluh, kita telah menyaksikan awal dari sebuah *‘locational revolution’*.” Revolusi ini terdiri dari bagian yang mungkin sekarang dapat kita sebut sebagai “neoliberalisme”, sebuah cara yang problematis tapi berguna dalam membentuk konsepsi

istilah militer tersebut. Winters menambahkan, “Sebagai sebuah fase dalam perkembangan kapitalisme, hal tersebut menyebabkan gangguan di bidang ekonomi dan membawa transformasi di bidang politik, sama halnya dengan Revolusi Industri ...” Namun, saya ingin membentuk gagasan bahwa revolusi ini tidak hanya bersifat *locational*, tapi juga bersifat *informal* dalam perluasannya. Redistribusi perusahaan formal ke belahan dunia bagian Selatan, mungkin dapat lebih dimengerti sebagai bagian dari perubahan menuju informalisasi kapitalisme global.

Dalam nilai nominal, Indonesia pernah menjadi sebuah tempat yang mencolok bagi perluasan ekonomi di sektor formal, karena investasi asing (dan kemudian investasi dalam negeri) bekerja untuk memodernisasi industri dan pertanian. Ekspor, baik dalam pengertian absolut maupun sebagai bagian dari perekonomian, mengalami peningkatan tinggi (Hill 1996). Dari 1966 sampai dengan 1991, usaha manufaktur meningkat dari 8 persen ke 22 persen jumlah GDP. Sementara usaha pertanian, merosot dari 51 persen ke 19 persen (Hill 1992: 20). Di tahun 1991, “untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa, hasil usaha manufaktur

melebihi usaha pertanian” (ibid: 19).⁴ Pertumbuhan usaha manufaktur di Indonesia berarti bahwa jutaan orang mencari nafkah di sektor yang baru dan bertumbuh pesat ini.

Dari perspektif teori pembangunan normatif, dan bahkan teori pembangunan kritikal, peningkatan usaha manufaktur akan mulai mengikutsertakan bagian yang lebih besar dari populasi. Alhasil, para tenaga kerja yang diupah ini akan menghabiskan pemasukan mereka dalam aktivitas di sektor formal yang sedang meluas, seperti mengunjungi pusat perbelanjaan dan membeli komoditas industri (bandingkan dengan Friedman 1999). Menurut Lourdes Benaría (2003: 109), “Selama tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an, sektor informal dalam perkembangannya dipandang sebagai bentuk pekerjaan sementara.” Sektor formal dipandang sebagai sektor “modern”, dan sebagai hasil perkembangan yang tak dapat terhindarkan. Sementara sektor

informal pada akhirnya akan menjadi sebuah masa lalu pra-modern⁵. Dengan kata lain, sektor formal perlahan-lahan akan menyerap, tak tertandingi, dan membuat sektor informal menjadi sektor yang terlarang. Namun, di Indonesia (dan di banyak tempat lain), sektor informal belum berkurang: berlawanan dengan semua prediksi, sektor informal malah meluas.

Dimanakah Sektor Informal?

Perluasan sektor informal di Indonesia tidak serta merta membatalkan model perkembangan konvensional. Sebagai contoh, krisis moneter 1997-1998 meninggalkan luka yang amat dalam pada perekonomian individual di Asia dan juga kawasan ini secara keseluruhan. Mata uang yang anjlok menghasilkan kebangkrutan, pemecatan, serta pengurangan dalam pengeluaran negara. Seperti yang sudah diperkirakan oleh semua orang, sektor informal di Indonesia serta

⁴) Antara tahun 1989 dan tahun 1991 sendiri, ekspor tekstil dan pakaian berlipat ganda, dan menjadi ekspor terbesar di Indonesia. Bahkan dalam periode yang sama, pertumbuhan ekspor alas kaki lebih cepat meningkat, melonjak dari US \$1 juta per tahun di awal tahun 1980-an ke US \$1 milyar per tahun di akhir dasawarsa. Antara tahun 1989 dan tahun 1991 penjualan alas kaki meningkat empat kali lipat (Hill 1992: 22). Untuk ikhtisar yang lebih lengkap, lihat Hill 1996, khususnya bab 8, “Transformasi Industri.”

⁵) Keinformalan secara menyeluruh dalam hubungan perekonomian di Indonesia menyerupai keadaan di Inggris di awal sampai dengan pertengahan abad ke-19 (lihat Thompson 1963).

merta meluas, karena jutaan orang mencari perlindungan ekonomi dari krisis yang terjadi (ILO 1998). Sesungguhnya, keuntungan di sektor informal diperoleh dengan cepat dan tersebar luas sehingga pengangguran hanya meningkat secara marjinal (Wie 2002: 239). Jadi, mungkin perluasan di sektor informal lebih disebabkan oleh krisis ekonomi yang terjadi baru-baru ini (Ishida 2000), dan mungkin juga, kita akan menyaksikan lagi sebuah perluasan sektor informal sebagai dampak dari krisis di tahun 2008. Dengan kata lain, ketika perekonomian formal di Indonesia mengalami tekanan episodik, sektor informal meluas dalam beberapa tahun sampai krisis ekonomi mereda. Namun demikian, saya ingin menyatakan bahwa pandangan normatif mengenai sektor informal ini mengevaluasi kualitas baru kapitalisme secara tidak benar.

Laporan ILO terbaru mengenai sektor informal di Asia menggunakan pandangan normatif. Meskipun terdapat beberapa aspek struktural dari perkembangan sektor informal, laporan ILO melihat perkembangan tersebut dalam hubungannya dengan “ketidakmampuan” mekanisme formal untuk memformalisasi kekuatan milyaran-tenaga kerja: “Kenyataan bahwa lebih dari satu milyar orang

Asia masih bekerja di bidang ekonomi informal mencerminkan sebuah ketidakmampuan mekanisme formal yang persisten dan menyulitkan, perlindungan dan sistem yang menembus atau melayani sejumlah pekerja dan tempat bekerja dengan secukupnya.” (ILO 2007: 18). Pandangan positif ini melihat sektor informal sebagai sebuah anomali yang menyulitkan, seolah-olah sektor formal belum mampu menyerap sektor informal. Laporan tersebut menyatakan bahwa kebijakan pembangunan yang layak akan membantu memformalisasi tenaga kerja yang sangat besar di benua ini.

Asumsi paradigmatik ini –yang menyatakan bahwa kebijakan pembangunan yang baik dapat memformalisasi milyaran tenaga kerja di Asia– sangatlah problematis. Pertama-pertama, asumsi ini gagal dalam mengikutsertakan dinamika struktural neoliberal yang mendorong perluasan ke dalam sektor informal. Kedua, laporan ILO kembali menyatakan kekeliruan dalam pembagian sektor informal/formal: formalisasi tenaga kerja yang superficial tidak (dan tidak akan) mengubah posisi dasarnya yang “informal” dalam perekonomian (Buechler and Buechler 1992). Dengan kata lain, penerapan prosedur formalisasi, mi-

salnya terhadap pedagang kaki lima di wilayah perkotaan Pulau Jawa, hanya akan membawa sedikit sekali perubahan yang berharga dalam lokasi, tingkah laku, dan artikulasi dalam hubungannya dengan perekonomian “formal” yang lebih mapan.

Hal yang ingin saya ajukan dalam tulisan pendahuluan ini adalah bahwa kapitalisme global sedang mengeskplotasi sektor informal di dunia secara agresif. Hegemoni modal keuangan –zaman neoliberalisme– sedang membuat tekanan-tekanan yang sangat besar untuk menurunkan biaya produksi. Dalam praktiknya, ini sama halnya dengan mengeksploitasi tenaga kerja informal dalam batasnya yang baru dan sangat luas. Seperti tidak pernah terjadi sebelumnya, perekonomian global menemukan dan menambang hasil dari sektor informal global. Dengan kecepatan dan kekuatan yang menakjubkan, kapitalisme menyebabkan *outsourcing*, penurunan keahlian, fleksibilisasi tenaga kerja (Castells dan Portes 1989; Mingione 1985). Yang sedang kita saksikan saat ini bukanlah “ketidakmampuan” sektor formal untuk menyerap sektor informal, tetapi sebaliknya. Dengan milyaran tenaga kerja dan tingkat pengangguran yang

semakin meningkat, kapitalisme neoliberal di abad ke-21 secara aktif sedang memproduksi dan memperbesar sektor informal global.

Adaptasi Ekonomi: Kecerdikan Informal

“Sektor informal” merupakan sebuah sistem perekonomian yang tidak didefinisikan secara baik, dan merupakan sebuah wilayah yang tidak dimengerti secara menyeluruh. Lebih mudah untuk memikirkan sektor tersebut, dibandingkan dengan mengetahuinya secara baik. Lebih mudah untuk menggenggamnya, dibandingkan dengan mengukurnya. Kita dapat mengatakan bahwa sektor informal adalah bagian dari sebuah perekonomian yang sebagian besar berfungsi tanpa peraturan, perpajakan, atau ketetapan. Sektor tersebut berpindah-pindah, berubah-ubah, dan tidak dalam keadaan aman. Sektor tersebut seringkali bersifat spontan, muncul secara cepat untuk mengisi celah yang dibentuk oleh perekonomian formal yang sulit dikelola.

Pada dasarnya sektor informal seringkali bersifat seperti parasit, mengeksploitasi sektor formal dan dirinya sendiri. Sektor informal adalah kolam yang sangat besar berisi tenaga kerja, bereaksi dan meluas secara terpadu dengan lingkaran

perekonomian. Sektor informal seringkali bersifat ilegal atau kuasi-ilegal dan secara teratur bertahan hidup dalam ladang ketidakpastian, dengan menggunakan penyuapan dan penipuan untuk melindungi hal-hal sedikit yang dimilikinya. Rentan terhadap lonjakan harga dan putaran perekonomian, para tenaga kerja di Jawa Barat telah menciptakan (dan diciptakan oleh) sebuah perekonomian informal dalam ukuran dan skala yang sangat besar.

Di Pulau Jawa, perekonomian rumah tangga dapat menyesuaikan diri dalam tingkatan yang luar biasa. Seperti yang diperlihatkan dalam literatur yang dibahas di bawah ini, keanekaragaman parameter dalam sektor informal menawarkan hal-hal yang dapat disesuaikan, yang dapat diperluas atau diperkecil, yang disesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu; jumlah jam kerja setiap anggota rumah tangga, jumlah pekerjaan di setiap rumah tangga, pekerjaan

yang menggunakan tenaga anak-anak, pertanian subsistensi (termasuk pertanian ilegal), tenaga kerja upahan musiman dari daerah perdesaan, tenaga kerja di daerah perkotaan di sektor informal, migrasi antar pulau dengan tujuan bekerja atau berdagang, bekerja di negeri seberang, ketergantungan pada kerabat dan lingkungan masyarakat untuk tujuan reproduktif, dan lain sebagainya.

Dalam penelitian lapangan saya bersama Resmi Setia Milawati, saya menemukan bahwa tenaga kerja di sektor informal di Bandung mempertahankan dan beradaptasi dengan kebiasaan lama para tenaga kerja, dengan tanpa terkecuali. Perekonomian rumah tangga dapat mengatasi masalah keuangan dan bersifat adaptif, sementara tenaga kerja perorangan memperlihatkan deretan keahlian, mobilitas dan kemampuan manuver yang sangat menakjubkan.⁶ Temuan awal saya menunjukkan bahwa para pekerja di sektor informal

⁶ Setiap orang harus berhati-hati dalam membuat model sektor informal dalam istilah yang terlalu dinamis. Penelitian lapangan saya sendiri menunjukkan bahwa beberapa anggota sektor informal di Bandung telah memiliki pekerjaan yang cukup stabil untuk beberapa tahun. Penelitian itu juga menunjukkan pola yang lebih dinamis dibandingkan dengan penelitian Schmidt di Bandung pada pertengahan tahun 1980-an. Saya beranggapan bahwa sektor informal bersifat semakin sementara sejak saat itu, dengan berbagai alasan yang saya telusuri di dalam tulisan ini, dan saya juga beranggapan bahwa Schmidt terlalu menekankan pada kestabilan sektor informal –Schmidt lebih menekankan penelitiannya pada pimpinan perusahaan di sektor informal, bukan pada pekerja pada umumnya, dan hal ini membuat datanya menjadi timpang (lihat Cremer 1989).

ini membentuk sebuah sub-perekonomian yang sangat besar. Sub-perekonomian ini mampu menurunkan biaya produksi di sektor formal dengan cara mempertahankannya bersama-sama dengan reproduksi dalam negeri, barang dagangan dan layanan dengan biaya murah, serta tenaga kerja yang dinamis. Penelitian saya juga menunjukkan bahwa para pengusaha manufaktur di Bandung semakin berpaling pada susunan tenaga kerja yang fleksibel, subkontrak, dan pembelian dari luar; kondisi di mana Indonesia banyak mengambil dari dan memproduksi sektor informal. Dengan menggunakan klaim ini, saya bertujuan meninjau kembali sebuah tulisan mengenai sektor informal yang dibuat pada tahun 1970-an, pernah diringkas oleh D.K. Forbes, "...di batas luar –produksi makanan dan barang-barang konsumen murah, pengelolaan cadangan barisan tenaga kerja, dan kesempatan yang ditawarkan untuk melengkapi pendapatan dalam bentuk gaji dan sebagai sebuah pasar untuk barang-barang kapitalis– sangatlah penting dalam produksi kapitalis" (1984: 173). Tapi, Forbes, sama halnya dengan Peet (2007), Harvey (2003), dan orang-orang terpelajar lainnya dalam bidang "globalisasi", tidak menghubungkan modal hegemoni

dengan produksi dan perluasan sebuah sektor informal global. Keunggulan ini sangatlah penting dalam memahami fase kapitalisme yang sedang terjadi saat ini.

Dalam penelitian saya, pertumbuhan informal di Indonesia merupakan sebuah hasil dan sumber ekstraksi modal dalam negeri dan modal internasional. Usaha manufaktur global tidak hanya semakin direlokasikan ke tempat-tempat seperti Indonesia, tapi perwujudan usaha manufaktur global di Indonesia juga semakin fleksibel. Sama halnya dengan perusahaan-perusahaan di dunia post-industri (Boltanski dan Chiapello 2005), perusahaan-perusahaan Indonesia memburu susunan "neoliberal" dengan tenaga kerja, pengelolaan, inventaris, dan produksi. Melalui subkontrak, pembelian dari luar, dan pengupahan pekerja sementara, sektor formal di Indonesia semakin menerobos ke dalam sektor informal, sebagai cara untuk menurunkan biaya tenaga kerja. Perubahan yang semakin dinamis di tingkat rumah tangga dan tenaga kerja, dijadikan zona ekonomi untuk menarik kekayaan. Saya yakin bahwa lapisan ekstraksi yang semakin dalam ini bukanlah sebuah kebetulan dalam kapitalisme global, tapi merupakan sebuah keterpaduan dalam perluasan baru sektor tersebut.

Perekonomian “Informal” yang Bertahan Lama: Kajian dari Pulau Jawa, Sumatra, dan Sulawesi

Meskipun puluhan juta tenaga kerja di Indonesia sesuai dengan tuntutan neoliberalisme yang fleksibel, kemampuan beradaptasi mereka bukanlah suatu hal yang baru. Seperti yang sudah didokumentasikan dalam banyak penelitian, banyak bagian dari yang sekarang disebut negara Indonesia dalam kurun waktu lama telah memperlihatkan taktik tenaga kerja yang dapat berpindah-pindah secara menakjubkan. Dengan pola perdagangan kapitalis, tenaga kerja yang diupah, kerajaan hierarkis dan kolonialisme yang bertahan lama, banyak orang di Indonesia telah menemukan cara-cara untuk menghadapi dikotomi formal/informal, dan untuk merespon fluktuasi pasar. Banyak penelitian yang telah mencoba untuk memahami seluk beluk perekonomian daerah tersebut, sejak berabad-abad yang lalu.

Saat ini saya ingin mengulas dan membahas beberapa penelitian yang telah dibuat sejak masa kemerdekaan dalam rangka memikirkan praktik-praktik informal yang tersebar luas di Indonesia. Ikhtisar-ikhtisar ini dapat membantu merangkai

sejarah, dan membuat hipotesis tentang munculnya sebuah “kaum proletar” di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Gambar yang dipilih secara selektif dari tulisan-tulisan di bawah ini menyatakan bahwa pola ekonomi dari hiper-fleksibilitas di Pulau Jawa (dan tempat-tempat lainnya di kepulauan tersebut) mempunyai sejarah yang panjang. Tanpa menyampingkan keanekaragaman di Indonesia yang sangat spasial dan temporal (bandingkan dengan Breman 1982, Lindblad 1993, Lindblad 1994), tulisan-tulisan tersebut dengan konsisten menunjukkan pola tenaga kerja yang fleksibel. Variabel strategi-strategi ekonomi ini –mulai dari tenaga kerja yang diupah sampai dengan kewirausahaan ritel, sampai pada titik migrasi, sampai pada sebuah pengelompokan keahlian dan praktik-praktik budaya secara subjektif– merupakan sebuah perangkat strategi subsistensi yang dapat berubah-ubah.

Produksi komoditas kecil telah menjadi sebuah aspek penting dalam perekonomian di daerah perdesaan di Pulau Jawa selama satu abad atau bahkan lebih (Alexander 1987, Boomgaard 1989, Fernando 1993, Padmo 1993, Wolters 1994). Alexander menyatakan bahwa orang-orang Belanda memulai tren –yang masih

terlihat sangat jelas dalam diskursus ekonomi yang dominan— dalam mereduksi perekonomian informal ini. Orang-orang Belanda meremehkan dan menempatkan sumber-sumber perilaku ekonomi dan penghasilan ini di batas luar. Sebuah tulisan ekstensif mengenai sejarah Hindia Belanda memperlihatkan sebuah gambaran mengenai fleksibilitas tenaga kerja di berbagai bagian dari kepulauan Jawa (bandingkan dengan Stoler 1995).

Clifford Geertz (1963: 30-1) memprakarsai beberapa pembahasan modern mengenai kehidupan di perdesaan Indonesia: susunan topik yang telah dibahas selama hampir setengah abad. Di sini, kami hanya mengambil sebagian kecil dari benang pembahasan tersebut: ikhtisar Geertz mengenai perdagangan komoditas kecil di Pulau Jawa. Penekanan Geertz dalam analisisnya mengenai pasar informal di Pulau Jawa memiliki batas-batas tertentu dan kecenderungan involusioner. Geertz menggambarkan penjual keliling sebagai orang-orang yang mengutamakan bahan-bahan yang mudah dijinjing dan mudah disimpan, penjual keliling yang memiliki omzet tinggi dan volume rendah. Meskipun banyak orang terpelajar telah memberikan kritik terhadap penguraian mengenai

pedagang informal ini, penguraian tersebut tetap bisa mempertahankan keabsahannya. Penelitian lapangan Geertz, lebih dari 50 tahun lalu, tentunya mencerminkan masa yang berbeda. Akan tetapi, seseorang hanya perlu mengunjungi warung dan pasar di tahun 2008 untuk menyaksikan tren yang sama terjadi. Namun demikian, dari fenomena yang sama, saya menyarankan agar kita tidak hanya berfokus pada batas-batas yang ada, tapi juga pada variabilitas dan mobilitasnya.

Beberapa dekade kemudian, Jane Alexander dalam tulisannya menunjukkan bahwa uraian tersebut tidak sepenuhnya sah, entah karena kesalahan yang dilakukan Geertz atau karena uraian Geertz telah melewati batas waktu (1987: 159). Namun demikian, Alexander mendukung sejumlah pengamatan Geertz mengenai perdagangan di sektor informal, dalam penelitian lapangan yang dilakukan tiga dekade kemudian. Alexander menyatakan, “Di daerah perdesaan di Pulau Jawa, di mana hampir semua keluarga tidak memiliki lahan yang cukup sebagai sumber nafkah—tidak cukup untuk seorang pun dalam keluarga— perdagangan dan pabrik perabot rumah tangga tidaklah perifer bagi beberapa keluarga, tapi

merupakan suatu komponen penting dalam upaya banyak rumah tangga demi kelangsungan perekonomian.” (1987: 86). Alexander menggambarkan produksi komoditas kecil di Jawa Tengah pada tahun 1980-an sebagai “sebuah bagian yang utuh dari masyarakat perdesaan di Pulau Jawa” dan di sana pula pabrik-pabrik kecil “tumbuh pesat dan cepat, dan mereda dengan cepat pula” (1987: 86).

Dalam tulisannya, Alexander menggambarkan ketertancapan produksi dan perdagangan komoditas kecil di dalam sektor perdesaan di Pulau Jawa. Alexander menuliskan tentang kelaziman yang hampir tidak kentara, sehubungan dengan pabrik komoditas kecil tidak lebih kurang lazim dibandingkan dengan pertanian. Pengamatan Alexander mengenai para produser ini adalah:

Pabrik-pabrik seperti itu beroperasi dalam sebuah kendala ekonomi tertentu: memaksimalkan penghasilan total dalam rumah tangga menjadi tujuan ekonomi utama. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan kapitalis yang memiliki tujuan untuk memaksimalkan laba dengan cara mengurangi tenaga kerja, para produser komoditas kecil di Pulau Jawa bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan tenaga kerja dalam rumah tangga dan hanya akan menoleransi pengurangan tenaga kerja dalam produktivitas tenaga kerja marjinal

dan laba, selama total penghasilan dalam rumah tangga ditingkatkan (1987: 87).

Alexander menyanjung Geertz dalam tulisannya, meskipun sanjungan tersebut disampaikan beberapa dekade kemudian dan bersamaan dengan berbagai kritik (bandingkan dengan White 1976, 1983). Para produser dan pedagang kecil yang digambarkan Alexander memperlihatkan fleksibilitas yang luar biasa dalam tingkatan perorangan, rumah tangga, perdesaan, dan tingkatan ekonomi lainnya yang lebih besar. Berlawanan dengan banyak perekonomian yang sangat dikendalikan oleh umur serta pangkat dan jenis kelamin, etnografi yang diterapkan Alexander menggambarkan sebuah kecairan konstan yang adaptif: “Dalam beberapa kesempatan, hampir semua anggota keluarga dalam sebuah rumah tangga akan melakukan pekerjaan apa pun juga” (1987: 90).

Dalam tulisan penting lainnya yang muncul di zaman yang sama, Ulrich Mai dan Helmut Buccholt (1987) melihat bahwa perekonomian di daerah perdesaan di Indonesia memiliki fleksibilitas yang sangat mengesankan. Bagi Mai dan Buccholt, perdagangan merupakan sebuah strategi penting

dalam rumah tangga, tapi hanya satu dari sekian banyak strategi lainnya. Panen-uang tunai, pertanian subsistensi, tenaga kerja yang diupah, dan usaha industri kerajinan tangan, sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup perekonomian rumah tangga. Selain itu, aktivitas-aktivitas semacam itu bergantung pada variasi dalam rumah tangga, musim, dan jumlah lahan yang dimiliki oleh sebuah keluarga.

Perubahan penting lainnya tentu sudah ada sejak masa Geertz di tahun 1950-an: berkurangnya kegiatan saling membantu, pertukaran barang, dan merenggangnya banyak hubungan sosial. Dengan adanya penaklukan perekonomian uang tunai, hampir semua orang Indonesia terlibat dalam ketenagakerjaan yang dijadikan komoditas, dan mengubah produksi menjadi nilai-nilai yang bisa diuangkan. Transformasi ideologi ini –bergabung dengan banyak sekali perubahan struktural– telah mengikis *mapalus*, kelompok *mutual-aid*. Seperti yang ditulis oleh Mai dan Buccholt, “Satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari kelaparan adalah dengan berdagang di pasar” (1987: 138). Tulisan mereka mengutip dan menyatakan pendapat yang sama dengan penelitian dari

Afrika dan Cina yang sudah lebih dahulu dipublikasikan: perekonomian rumah tangga di perdesaan di Indonesia –dan bukan di dunia internasional– sedang menurun, tidak lagi sembeda, dan telah berpaling selamanya kepada pasar untuk kecukupan makanan dan minuman (1987: 144).

Model Hans-Dieter Evers (1994a, 1994b) diukur sesuai dengan tingkatan para pedagang: Evers menolak untuk mereduksi perekonomian para pedagang tersebut atau hanya melihat mereka sebagai efek samping dari kegiatan perekonomian yang lebih besar. Evers, dengan para koleganya, memberikan kontribusi dalam menghasilkan sebuah model perdagangan informal dalam bidang tertentu. Contoh-contoh historis yang dibahas di atas menggambarkan kapasitas yang tahan lama bagi tenaga kerja yang memiliki berbagai keahlian, dapat berpindah-pindah, dan fleksibel (bandingkan dengan Aklilu dan Harris 1980). Ketenagakerjaan di Indonesia mempunyai sebuah sejarah fleksibilitas yang telah menghasilkan ketenagakerjaan yang mudah menerima upaya perluasan kapitalisme global terbaru, dan khususnya ketergantungan pada pertumbuhan sektor informal.

Kemunculan Mendadak Hegemoni Neoliberal dan Misteri di Baliknyanya

Di akhir tahun 1970-an, sebuah tatanan hegemoni baru mulai terwujud. Kepadatan yang lama mulai meleleh, dan cairan stabil menguap menjadi gas. Fakta-fakta statis yang telah berusia satu abad tiba-tiba menjadi sebuah lelucon: hegemoni agung dalam manufaktur, militer, dan negara, menjadi tiada. Produser-produser besar di dunia dengan cepatnya memohon belas kasihan pada modal. Tangan besi kekayaan manufaktur yang telah memerintah masyarakat kapitalis selama bertahun-tahun, mengikatkan dirinya pada fleksibilitas di bidang produksi dan mobilitas modal yang tak terkekang (Boltanski dan Chiapello 2005). Dan, dengan sekutu baru yang terdiri dari Ronald Reagan, Margaret Thatcher (saat itu masing-masing adalah Presiden AS dan Perdana Menteri Inggris, Red) dan institusi-institusi keuangan internasional, modal keuangan menghasilkan sebuah rezim baru (Harvey 2003). Sistem yang dipakai adalah sistem yang berdasarkan manufaktur dengan biaya paling rendah, sebuah sistem yang tidak bergantung pada tempat, stabilitas, dan infrastruktur

(Peet 2007). Setelah bertahun-tahun menerapkan kebijakan perkembangan “pro negara Barat”, semua negara di dunia bagian Selatan telah dipersiapkan untuk penanaman modal dan perekonomian yang didorong oleh kegiatan ekspor. Dengan kemampuan untuk mengadakan produksi komoditas di seluruh dunia, dan dipersenjatai dengan ancaman untuk mencabut dana, modal keuangan mulai menghancurkan posisi tawar-menawar dalam usaha manufaktur dan juga posisi tawar-menawar dalam ketenagakerjaan.

Saat ini, dan untuk beberapa dekade selanjutnya, kita menyebutnya sebagai era “globalisasi” atau hanya menyebutnya dengan kebijakan-kebijakan “perdagangan bebas”. Banyak pengamat telah menggunakan istilah “neoliberalisme”⁷: sebuah kata yang mengungkapkan liberalisasi pergerakan modal, pembebasan modal dari batas-batas dan pungutan yang ada, dan juga persediaan dana perusahaan dan modal yang pernah disediakan untuk kepentingan manusiawi (MacEwan 1999).⁷ Yang ingin saya capai bukanlah hanya mendapatkan kapasitas kebebasan spasial dalam penggunaan modal keuangan ataupun memerintahkan

⁷) Kebangkitan neoliberalisme sangatlah tiba-tiba dan tersebar luas sehingga banyak yang masih berjuang keras dalam menghadapi dampaknya. Bahkan para advokat dari rezim

susunan yang fleksibel, tapi yang ingin saya dapatkan adalah pola-pola akumulasi informal yang mempermudah lapisan-lapisan baru dari penetrasi dan eksploitasi ekonomi.

Neoliberalisme dan Instrumen Perdagangan Bebas

Semua pergerakan dan kekuatan mobilitas modal yang luar biasa di abad ke-21 tidaklah mutlak. Afrika, Asia, dan Amerika Latin, diabaikan atau diperlakukan dengan tidak hormat oleh para penanam modal asing, sehingga terjadi pengurangan tempat dan populasi bagi usaha manufaktur. Sehubungan dengan kebutuhan manufaktur yang berorientasi ekspor, banyak negara yang mengalami kekurangan di bidang infrastruktur, pemerintahan, stabilitas, dan kaum proletar yang dianggap perlu oleh para kapitalis besar.⁸ Terobosan-terobosan dalam perluasan ini dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja di Dunia Ketiga. Negara-negara yang berpenduduk banyak dan kaya akan

sumber daya, seperti Indonesia, memiliki kekuatan tawar-menawar (MacEwan 1999: 63). Tapi meskipun manufaktur global tidak ekstensif seperti yang seharusnya, kebijakan-kebijakan neoliberal dapat memberikan perlindungan akan pertumbuhan keuntungan di tempat-tempat seperti Indonesia.

Dalam teori, keadaan geografis manufaktur global yang terbatas, meningkatkan kekuatan tawar-menawar antara para pemain tersebut. Mil-yaran pekerja yang dieliminasi dari pertandingan tersebut, berakibat pada sedikitnya populasi tersisa yang dianggap layak dalam usaha manufaktur. Dan banyak dari daerah yang tersisa, dianggap memiliki daya tarik tinggi karena mereka dapat memberikan gaji rendah, memiliki perlindungan terhadap properti, tingkat pajak yang rendah dan kelonggaran peraturan, serta tenaga kerja yang penurut. Lalu seseorang mungkin dapat melihat kemungkinan untuk tawar-menawar dalam hal upah dan kondisi tempat kerja yang lebih

yang baru masih kelihatan bingung dalam menghadapinya. Tindakan-tindakan bodoh yang mereka lakukan terungkap di seluruh dunia selama krisis keuangan di tahun 2008. Hal lain yang terungkap adalah bahwa pengetahuan para ahli ideologi hanya mengetahui sedikit sekali mengenai hegemoni siapa yang mereka kerjakan. Tapi meskipun krisis keuangan menghasilkan pengelolaan keuangan global yang lebih berhati-hati, hal tersebut hanya akan berdampak kecil dalam barisan neoliberalisme, sebuah sistem yang setelah beberapa dekade masih saja menyusun ulang sistem ekonomi secara global.

⁸⁾ Seluruh anggota populasi terikat pada produksi pertanian atau ekstraksi sumber daya, memiliki sejarah yang berkuasa atas pemberontakan tenaga kerja, atau dilihat melalui pandangan rasis.

baik, meskipun mungkin hasilnya minimal.⁹

Akan tetapi, pencarian penghasilan yang lebih baik melalui batas-batas persaingan, selalu terbentur dengan kekuatan institusi-institusi keuangan internasional yang membatasi persaingan antar kaum elit (atas nama “stabilitas”) dan memaksa persaingan di antara kaum bawah (atas nama “perdagangan bebas”). Selain itu, institusi-institusi seperti Bank Dunia dan Dana Keuangan Internasional (IMF), memberikan tekanan yang luar biasa untuk mengurangi pengeluaran di sektor publik, untuk menjamin perdagangan dengan tingkat perpajakan dan peraturan yang rendah, dan untuk memastikan keamanan investasi dan mobilitas modal. Antara tumbang-

nya perekonomian dan kekayaan untuk kolusi, oligarki Dunia Ketiga seringkali terbukti menjual tenaga kerja mereka kepada penawar rendah. Sebagai hasilnya, “negara-negara yang baru saja diindustrialisasikan membuat dirinya menjadi informal... untuk mendapatkan keuntungan yang relatif.” (Castells dan Portes: 29; bandingkan dengan Jakarta Post Editors 2008).¹⁰

Di Indonesia, program penyesuaian struktural dan kebijakan-kebijakan neoliberal lainnya telah membawa penderitaan pada orang-orang miskin. Terkait dengan dorongan untuk membatasi pengeluaran sosial, Indonesia mengurangi sumber jaringan keamanan dan layanan-layanan sosial. Sektor informal di Indonesia adalah sektor yang terkena dampak

⁹) Lonjakan harga minyak di tahun 1970-an memberikan kekuatan tawar-menawar yang besar kepada Indonesia selama sekitar satu dekade (Winters 1996). Ternyata, Indonesia mampu menerapkan hukum upah minimum, meskipun hasilnya mengejutkan. Pembuatan undang-undang hukum upah minimum di tahun 1970-an, dan penerapannya di tahun 1980-an, menghasilkan tingkat upah yang lebih tinggi di sektor formal dan sektor informal yang sedang berkembang. Seperti yang dinyatakan oleh Frankema dan Marks (2007: 11), kebijakan-kebijakan tersebut meningkatkan upah secara efektif di sektor formal dan mungkin membatasi perekrutan tenaga kerja dari sektor formal. Selanjutnya, laju perubahan dari migrasi perdesaan ke perkotaan nampaknya semakin cepat akhir-akhir ini. Tapi di tahun 1990-an, statistik menunjukkan adanya kedatangan masal dari daerah perdesaan (Butzer dkk. 2003). Jadi kita menyaksikan dua tren lagi (upah formal yang lebih tinggi dan meningkatnya urbanisasi) yang menghasilkan perluasan sektor informal dan tekanan yang menyeluruh pada upah.

¹⁰) Para editor The Jakarta Post menuntut deregulasi hukum ketenagakerjaan dan juga menuntut peningkatan fleksibilitas tenaga kerja sebagai bagian tugas dari para pemilik perusahaan. Mereka menuliskan, “Ketika perusahaan harus memotong biaya agar tetap dapat bersaing di pasar internasional, tetap saja peraturan-peraturan tenaga kerja terlalu kaku untuk terjadinya proses penyesuaian dalam struktur perekrutan tenaga kerja.”

yang paling besar dari kebijakan-kebijakan tersebut. Konsekuensi yang paling mendasar dari kebijakan-kebijakan ini adalah peningkatan sektor informal dalam jumlah besar, karena berbagai alasan yang rumit. Alasan utamanya berada pada struktur ekonomi yang mementingkan pembelian dari luar (impor), subkontraksi, dan bentuk fleksibilitas lainnya. Alasan lainnya yang terkait dengan perluasan sektor informal di bawah kebijakan-kebijakan neoliberal, adalah melibatkan lebih sedikit orang dalam birokrasi, lebih sedikit orang yang terlibat dalam perekrutan tenaga kerja yang disponsori oleh negara (misalnya dalam bidang kedokteran dan pendidikan), dan menurunnya jumlah layanan-layanan sosial.

Selanjutnya, layanan-layanan minimum yang disediakan oleh pemerintah dalam hal pendidikan, kesehatan, perawatan anak, dan bidang-bidang lainnya, telah memaksa orang banyak untuk beralih pada sektor informal. Orang-orang Indonesia pada umumnya mengandalkan sektor informal untuk memenuhi kebutuhan dasar yang jumlahnya banyak. Dengan kata lain, menurut Benería (2003: 109), “deregulasi pasar dan reorganisasi proses kerja dalam tingkat perusahaan... telah memperkuat [kecenderungan-kecen-

derungan yang telah ada], meninggalkan sejumlah besar sektor di pinggir-an kegiatan-kegiatan inti, di mana kegiatan-kegiatan informal lebih dahulu mendominasi.”

Tenaga kerja semakin dilemahkan oleh bertambahnya jumlah lokasi usaha manufaktur lainnya, seperti Vietnam dan Guatemala. Negara-negara tersebut secara cepat menjadi pesaing-pesaing tangguh dalam upaya pencarian biaya tenaga kerja yang lebih rendah. Sebagai contoh, pertumbuhan terbaru dari produksi alas kaki dan ekspor kopi buatan Vietnam, telah membebani sektor-sektor perekonomian Indonesia yang berorientasi ekspor. Negara-negara lain menyusul: tempat-tempat seperti Kamboja memperoleh daya gerak sebagai produsen komoditas. Dengan zona usaha manufaktur yang baru, keadaan keuangan global dapat menuntut upah yang lebih rendah, pengurangan pajak, dan kelonggaran peraturan: mobilitas kedisiplinan lebih mengancam ketenagakerjaan dan semakin mendatangkan keuntungan bagi banyak perusahaan.

Cina: Palu Neoliberalisme

Sebuah kondisi tunggal yang mengalahkan kapasitas negara-negara miskin dalam memperoleh

pendapatan yang lebih baik, adalah kebangkitan usaha manufaktur di Cina. Dengan kecepatan yang menakjubkan, Cina mengubah peraturan-peraturan kapitalisme global. Cina “memonopoli usaha manufaktur dengan tenaga kerja yang diupah rendah... negara-negara [lainnya] tidak dapat menandingi persediaan tenaga kerja tak terbatas di Cina yang bersedia dibayar 25 sen setiap jamnya” (Peet 2007: 124). Wawancara saya dengan pemilik perusahaan dan pemilik agen tenaga kerja di Bandung pada tahun 2008 menunjukkan bahwa ekspor dari Cina telah mengubah lahan perekonomian. Tibanya usaha manufaktur Cina yang menyerupai raksasa pada tahun 1990-an berakibat pada sebuah kondisi ketenagakerjaan yang putus asa. Infrastruktur yang diatur oleh negara dan kedisiplinan tenaga kerja, dengan tingkat pajak dan peraturan yang minimum, menjamin “kebebasan” yang paling diinginkan dalam keuangan global, yaitu kebebasan untuk membayar upah dengan tingkat subsistensi, tuntutan jam kerja panjang dengan keuntungan minim, dan beroperasi tanpa adanya pengawasan dari pemerintah.

Sebelum reformasi ekonomi di tahun 1980-an, Cina hampir tidak memiliki pengaruh terhadap usaha manufaktur global. Malah sekumpulan negara lain telah menempuh jalan usaha manufaktur lebih dulu. Negara-negara seperti Taiwan, Singapura, dan Korea Selatan, secara antusias menyambut usaha manufaktur yang memberikan upah rendah dan memiliki peraturan yang terbatas. Meskipun jumlahnya terbatas, perekonomian yang juga disebut sebagai *tiger economies* ini, mampu memberikan upah yang lebih baik, bahkan ketika mereka menanam modal di dalam populasi mereka. Dari tahun 1950-an sampai dengan 1970-an, pertumbuhan perekonomian ini berlangsung di dalam keadaan yang sangat unik, di mana persaingan masih minim, sebelum kebangkitan neoliberalisme, dan sebelum kehadiran ekspor dari Cina.¹¹

Pada tahun 1980-an, Indonesia menyaksikan masuknya penanaman modal asing besar-besaran dan pinjaman yang sangat besar dari institusi-institusi keuangan internasional. Tapi, meskipun tanpa mekanisme-mekanisme lainnya –bahkan tanpa adanya jutaan tenaga kerja dan

¹¹) Lihat MacEwan 1999 untuk pembahasan diskursus “Macan” dalam hubungannya dengan “perdagangan bebas.”

tuntutan dari institusi-institusi keuangan internasional—Cina telah membuktikan bahwa dirinya adalah palu yang menghalangi negosiasi antar pengusaha manufaktur.

Seperti halnya Saudi Arabia yang menghasilkan minyak, Cina bergerak di bidang usaha manufaktur. Kapasitas produktif Cina dapat menentukan harga dan cara pengaturan. Bagi Indonesia, kehadiran Cina baru-baru ini dalam persaingan telah berakibat pada menurunnya keuntungan yang diperoleh, penutupan tempat-tempat usaha, dan sebuah lingkungan usaha yang tidak aman. Saya berbicara dengan para pemilik pabrik tekstil dan pemasok tenaga kerja, yang menggambarkan adanya tekanan dari Cina yang selalu berkembang (lihat Miranti, 2007: 7) dan memaksa mereka untuk memotong biaya tenaga kerja dengan cara menggunakan mesin sebagai pengganti tenaga manusia.

Terdapat cukup banyak alasan untuk memercayai klaim yang diajukan oleh kelas produksi yang saya wawancara untuk tulisan ini. Apalagi, impor mesin tekstil terus meningkat selama bertahun-tahun: biaya tenaga kerja di Cina yang lebih rendah berakibat pada penggunaan mesin sebagai upaya mencapai produktivitas dan daya saing yang lebih tinggi. Tekanan-tekanan dari Cina dan kebijakan-

kebijakan neoliberal menghasilkan serangkaian praktik yang memakan biaya produksi yang lebih rendah. Jadi meskipun benar adanya bahwa pengupahan di sektor formal Indonesia tidak lagi “berdaya saing”, jutaan pekerja informal memungkinkan adanya usaha manufaktur dengan biaya rendah. Dengan bangkitnya neoliberalisme dan Cina, perekonomian Indonesia semakin melibatkan mekanisme yang berinovasi dalam mengeksploitasi sektor informal yang berkelimpahan.

Informalisasi di Indonesia

Perluasan sektor informal di dunia telah berlangsung selama lebih dari dua dekade, dan pertumbuhan sektor tersebut nampaknya akan terus berkelanjutan. Sehubungan dengan dunia global di bagian Selatan, Benería menulis, “...dalam dua dekade terakhir, kecenderungan-kecenderungan ini semakin menguat. Kita telah menyaksikan sebuah peningkatan ketergantungan perusahaan dan rumah tangga dalam merekrut tenaga kerja yang fleksibel dan sebuah kemunduran kondisi pasar tenaga kerja dalam proporsi yang besar.” (2003: 110). Meskipun dalam berbagai hal keadaan politik dan ekonomi di Indonesia unik

adanya, keadaan tersebut membentuk sebuah pola yang juga dapat dilihat di berbagai bagian dunia post-kolonial. Penelitian-penelitian terbaru mengenai rasio perekonomian informal/formal, menempatkan Indonesia di sebuah masa perluasan informal (Direktorat 2004).

Data terbaru ini tidak hanya menunjukkan sebuah kebangkitan dalam sektor informal di Indonesia, tapi juga menunjukkan sebuah penurunan yang relatif di dalam sektor formal. Persentase ketenagakerjaan di sektor formal turun menjadi 30,37 persen dan di sektor informal meningkat hingga 69,63 persen. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2008 jumlah pekerja yang terserap di sektor informal telah mendekati 72 persen (dikutip dari Rukmana 2008). Sekali lagi, angka-angka ini tidak terlalu bisa diandalkan karena terlalu mirip dengan angka-angka pada saat krisis keuangan di tahun 1997-1998. Perubahan ini tidaklah mengejutkan, dikarenakan adanya krisis yang baru terjadi. Sebuah penelitian berjangka panjang menunjukkan temuan yang mengejutkan: dari tahun 1960-an hingga 1990-an, selama masa pertumbuhan ekonomi besar-besaran, sektor informal juga ikut bertumbuh.

Menurut model pembangunan

normatif, seharusnya terjadi penurunan di sektor informal pada masa perluasan ekonomi yang luar biasa kuatnya ini. Apalagi, usaha manufaktur dan ekspor selama masa tersebut berkembang secara pesat, dan produk domestik bruto pun meningkat dengan kecepatan tinggi. Dalam waktu tiga dekade, pertumbuhan ekonomi di Indonesia –sehubungan dengan produk domestik bruto yang sebagian besar dimengerti melalui perekonomian formal– sangatlah luar biasa (Fisman dan Miguel 2008: 41). “Namun,” seperti yang ditulis oleh Frankema dan Marks (2007: 1), “hasil yang kami peroleh menunjukkan bahwa ketimpangan penghasilan antar dan intra sektor meningkat dengan cepat di bawah pemerintahan Soeharto, sama halnya dengan tenaga kerja yang terlibat dalam aktivitas di sektor informal.”

Bagi institusi-institusi keuangan internasional (IFIs) dan rezim Orde Baru, sektor informal akan menghilang dengan sendirinya karena sektor formal menyediakan pekerjaan-pekerjaan yang sangat menarik, modal yang lebih banyak, dan peningkatan penghasilan (Hill 1996). Sektor informal di Indonesia seharusnya digantikan oleh sektor formal, karena perluasan yang terjadi terus menerus di sektor formal. Perubahan

besar ini tanpa diduga-duga tidak pernah terjadi: “Sangatlah mengejutkan bagi para pengamat ketika perdagangan kecil di Pulau Jawa tidak menghilang ataupun menurun semasa ‘lonjakan minyak’ di tahun 1970-an dan 1980an;¹² sebaliknya, perdagangan tersebut berkembang.” (Evers 1994: 69).

Pertumbuhan informal mungkin bersifat intrinsik dalam bentuk kapitalisme di Indonesia: “jenis kapitalisme yang dipraktikkan di Indonesia sejak rezim Orde Baru mengambil alih kekuasaan di pertengahan tahun 1960-an mengharuskan adanya aktivitas-aktivitas di sektor informal di dalam kota,” untuk menyediakan “barang-barang dan layanan yang murah” bagi perusahaan-perusahaan formal (Sarosa 1993: 172, penekanan ditambahkan). Di masa pasca Suharto, tren-tren ini semakin jelas. Sebuah kenyataan yang mungkin mengharuskan adanya upaya-upaya baru untuk memahami sektor informal dalam kapitalisme neoliberal.

Kesimpulan

Ketika kapitalisme global menerobos batas-batas baru, kapitalisme tersebut telah menemukan cara baru untuk mengeksploitasi perekonomian informal di dunia yang sedang berkembang. Namun demikian, tidak semua perekonomian informal sesuai dengan kebutuhan modal keuangan. Di beberapa negara, perekonomian informal terlalu keras atau terlalu fleksibel. Sebagian perekonomian dan tenaga kerja tidak dipersiapkan untuk menghadapi perputaran ekonomi yang cepat. Subsistensi yang berlipat ganda dan praktik-praktik tenaga kerja informal menghasilkan lahan perekonomian yang subur untuk menerapkan kapitalisme neoliberal yang menghasilkan batas-batas baru yang sangat luas dalam perekonomian informal di dunia.

Para pemilik pabrik di negara-negara dunia ketiga mungkin tidak secara spesifik bertujuan untuk mengeksploitasi sektor informal. Keterpaduan perekonomian informal adalah sebuah keunggulan yang tidak

¹²⁾ Untuk informasi lebih banyak mengenai lonjakan harga minyak dan hubungannya dengan perekonomian Indonesia, lihat Winters 1996. Untuk informasi lebih banyak mengenai hubungannya dengan sektor informal, lihat Sarosa 1993, khususnya bab IV. Kedua penulis membedakan lonjakan tersebut dengan hubungan ekonomi sebelum dan setelah kenaikan harga minyak.

lagi baru di banyak negara. Institusi-institusi keuangan internasional pun tidak lagi mendorong perubahan dalam sektor informal. Sesungguhnya, institusi-institusi keuangan internasional masih membentuk sektor formal yang selalu meluas (bandingkan dengan Bank Dunia 2006): kebijakan-kebijakan “perdagangan bebas” ditujukan untuk memopulerkan pertumbuhan perekonomian di seluruh dunia. Namun demikian dalam praktiknya, kapitalisme terus menemukan batas-batas sektor non-formal untuk dieksploitasi, dan pertumbuhan sektor formal bergantung pada pertumbuhan dalam bidang informal secara terus menerus.

Ketenagakerjaan di Indonesia telah cukup lama memperlihatkan serangkaian kualitas yang bermanfaat

bagi modal. Model ketenagakerjaan yang bersifat adaptif, dapat berpindah-pindah, memiliki berbagai keahlian, dan dapat mengatasi setiap masalah. Seperti yang sudah diperdebatkan oleh para analis sektor non-pertanian di daerah perdesaan (White 1976; Padmo 1993, Fernando 1993) dan perekonomian industri di daerah perdesaan (Wolf 1992), keuntungan diperoleh dari super-eksploitasi tenaga kerja yang hak miliknya dicabut dan yang bergantung pada penghasilan rumah tangga untuk memungkinkan pola bekerja yang fleksibel. Kapitalisme global kontemporer terus mencari rakyat jelata yang dapat dieksploitasi, dan pencarian tersebut dimungkinkan oleh sektor informal yang terus meluas di Pulau Jawa.

Daftar Pustaka

- Aklilu, Bisrat and John R. Harris. 1980. "Migration, Employment, and Earnings," pp. 121-53 in Gustav F. Papanek (ed.) *The Indonesian Economy*, NY: Praeger.
- Alexander, Jane. 1987. *Trade, Traders, and Trading in Rural Java*. Singapore: Oxford University Press.
- Benaría, Lourdes. 2003. *Gender, Development, and Globalization: Economics as if All People Mattered*. NY: Routledge.
- Boltanski, Luc and Eve Chiapello. 2005. *The New Spirit of Capitalism. Gregory Elliot, trans.* NY: Verso.
- Boomgaard, Peter. *Children of the Colonial State: Population Growth and Economic Development in Java, 1795-1880*. Amsterdam: Free University Press.
- Breman, Jan. 1982. "The village on Java and the early colonial state," *Journal of Peasant Studies*, 9:189-204.
- Buechler, Hans C. and Judith-Maria Buechler. 1992. *Manufacturing Against the Odds: Small-Scale Producers in an Andean City*. Boulder, CO: Westview Press.
- Butzer, R., Y. Mundlak, and D.F. Larson. 2003. "Intersectoral Migration in Southeast Asia: Evidence from Indonesia, Thailand, and the Philippines," *World Bank Policy Research Paper Series*, No. 2949
- Castells, Manuel and Alejandro Portes. 1989. "World underneath: The Origins, Dynamics, and Effects of the Informal Economy," pp. 11-40 in Portes et al (eds.), *The Informal Economy: Studies in Advanced and Less Developed Countries*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- Cremer, Georg. 1989. Review of Felix Schmidt, 1988: "Der Beitrag des Staedtischen Informellen Sektors zur Sozialoekonomischen Entwicklung Indonesiens. Dargestellt am Beispiel der Stadt Bandung [The Contribution of the Urban Informal Sector to Socio-economic Development in Indonesia: The Case of the City of Bandung]," *Schriften zu Regional - und Verkehrsproblemen in Industrie - und Entwicklungslaendern*, Bd 45, Berlin: Duncker and Humbolt. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, vol. 25 No I., pp. 129-31.
- Direktorat Ketenagakerjaan dan Analisis Ekonomi. 2004. "Studi Profil Pekerja Di Sektor Informal Dan Arah Kebijakan Ke Depan"
- Evers, Hans-Dieter. 1994a "The traders' dilemma: a theory of the social transformation of markets and society," pp. 7-14, in Hans Dieter Evers and Heiko Schrader (eds.) *The Moral Economy of Trade: Ethnicity and developing markets*. NY: Routledge.
- 1994b. "Javanese Petty Trade," pp. 68-75 in Hans Dieter Evers and Heiko Schrader (eds.) *The Moral Economy of Trade: Ethnicity and developing markets*. NY: Routledge.
- Fernando, M.R. "Growth of non-agricultural indidgenous economic activities in Java, 1820-1880," pp. 89-109 in Lindblad 1993.

- Fisman, Raymond and Edward Miguel. 2008. *Economic Gangsters: Corruption, Violence, and the Poverty of Nations*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Forbes, D.K. 1984. *The Geography of Underdevelopment: A Critical Survey*. London: Croom Helm.
- Frankema, Ewout and Daan Marks. 2007. "Was It Really "Growth with Equity" under Soeharto? A Theil Analysis of Indonesian Income Inequality, 1961-2002," Research Memorandum GD-93, Groningen Growth and Development Centre July 2007
- Friedman, Thomas L. 1999. *The Lexus and the olive tree*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Geertz, Clifford. 1963. *Peddlers and Princes: Social Economic Development and Change in Two Indonesian Towns*. Chicago: University of Chicago Press.
- Hart, Gillian. 1986. *Power, Labor, and Livelihood: Processes of Change in Rural Java*. Berkeley, University of California Press.
- Harvey, David. 2003. *The New Imperialism*. Oxford: Oxford University Press.
- Hill, Hal. 1992. "The Economy 1991/92," pp. 17-42 in Harold Crouch and Hal Hill (eds) *Indonesian Assessment 1992: Political Perspectives on the 1990s*. Canberra: Australian National University.
1996. *The Indonesian Economy Since 1966*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- ILO (International Labour Organization). 1998. *Employment Challenges of the Indonesian Economic Crisis*, June, Jakarta: United Nations Development Programme.
2007. *Visions for Asia's Decent Work Decade: Growth and Jobs to 2015*, and background paper *Rolling back informality*, International Labour Organization, Asian Regional Forum on Growth, Employment and Decent Work, Beijing, 13-15 August 2007.
- Ishida, Masami (ed.). 2000. *Economic Crisis in Indonesia*. Chiba, Japan: Institute of Developing Economies.
- Jakarta Post Editors. 2008. "Tough for workers, employers," *The Jakarta Post*, lead editorial, p. 6, Tuesday, November 25, 2008.
- LaBotz, Dan. 2001. *Made in Indonesia: Indonesian Workers Since Suharto*. Cambridge, MA: South End Press.
- Lindblad, J. Thomas (ed.). 1993. *New Challenges in the Modern Economic Theory of Indonesia*. Leiden: Programme of Indonesian Studies.
- Lindblad, J. Thomas. 1994. "The contribution of foreign trade to colonial state formation in Indonesia, 1900-1930." pp. 93-115 in Robert Cribb (ed.), *The Late Colonial State in Indonesia: Political and Economic Foundations of the Netherlands Indies 1880-1942*. Leiden: KITLV.
- MacEwan, Arthur. 1999. *Neo-liberalism or Democracy? Economic Strategy, Markets, and Alternatives for the 21st Century*. London: Zed.
- Mai, Ulrich, and Helmut Buchholt. 1987. *Peasant Peddlars and Professional Traders: Sub-*

- sistence Trade and Rural Markets of Minahasa, Indonesia*. Singapore: ISEAS.
- Mingione, Enzo. 1985. "Social reproduction of the surplus labour force: the case of Southern Italy," pp. 14-54 in Nanke Redclift and Enzo Mingione (eds.) *Beyond Employment: Household, Gender, and Subsistence*. Oxford, UK: Basil Blackwell.
- Miranti, Ermina, 2007. "Mencermati Kinerja Tekstil Indonesia: Antara Potensi Dan Peluang," *Economic Review*, no. 209.
- Padmo, Sugiyanto. 1993. "The development of non-farm employment opportunities in the regency of Cirebon, 1830-1930," pp. 110-22 in Lindblad 1993.
- Peet, Richard. 2007. *Geography of Power: the Making of Global Economic Policy*. NY: Zed Books.
- Portes, Alejandro, Manuel Castells, and Lauren A. Benton. 1989. *The Informal Economy: Studies in Advanced and Less Developed Countries*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- Rukmana, Deden. 2008. "Street Vendors also Deserve Urban Space," *The Jakarta Post*, November 08, 2008.
- Sarosa, Wicaksono. 1993. "The Dual 'Formal-Informal' Growth of Jakarta: A Study of the Morphological Impacts of Economic Growth in a Metropolis of the Developing World." Thesis, Master of City Planning, University of California, Berkeley.
- Stoler, Ann. 1995. *Capitalism and Confrontation in Sumatra's Plantation Belt, 1870-1979*. 2nd ed. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Suwarni, Yuli Tri. 2008. "Workers rally against mayor on minimum wage," *The Jakarta Post*, November 22, 2008, page 8.
- Thompson, E.P. 1963. "Artisans and Others," pp. 234-68 in *The Making of the English Working Class*, NY: Vintage.
- White, Ben. 1976. "Population, employment and involution in a Javanese village." *Development and Change*, 7: 267-90.
- White, Ben. 1983. "Agricultural Involution and Its Critics: Twenty Years after Clifford Geertz." The Hague, Institute of Social Studies Working Paper Series No. 6.
- Wie, Thee Kian. 2002. "The Soeharto era and after: stability, development and crisis, 1966-2000," pp. 194-243 in Howard Dick, Vincent J.H. Houben, J. Thomas Lindblad, and Thee Kian Wie, *The Emergence of a National Economy: An economic history of Indonesia, 1800-2000*. Crows Nest, Australia: Allen & Unwin.
- Wolf, Diane Lauren. 1992. *Factory daughters: Gender, household dynamics, and rural industrialization in Java*. Berkeley: University of California Press.
- Wolters, Willem. 1994. "From corvée to contract labour; Institutional innovation in a Central Javanese village around the turn of the century," pp. 173-90 in Robert Cribb (ed.), *The Late Colonial State in Indonesia: Political and Economic Foundations of the Netherlands Indies 1880-1942*. Leiden: KITLV.
- World Bank. 2006. "Country Assistance Strategy Progress Report for Republic Of Indonesia, September 5, 2006," Report No. 36856-IND.